

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam meningkatkan pembangunan suatu negara terutama dalam menghadapi abad baru yang dikenal dengan abad milenium, *revolusi industri 4.0*, atau masyarakat 5.0, sehingga mutu merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari (Anne Sarvitri & Achmad Supriyanto, 2020). Namun masih terdapat beberapa masalah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yaitu dalam hal pemerataan, *relevansi*, *efisiensi* dan mutu pendidikan (Dedy Achmad Kurniady, Linda Setiawati, 2018). Dalam dunia pendidikan, peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh banyak aspek seperti pengelolaan, kurikulum, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, dan masih banyak lagi yang saling menunjang dalam mencapai visi, dan misi pendidikan (Ismail, 2016).

Implikasi pada peningkatan mutu pendidikan itu sendiri, dikenal dengan istilah *total quality management (TQM)*, yang merupakan sistem manajemen yang berfokus pada semua staf, bertujuan untuk terus menerus meningkatkan kepuasan bagi *stakeholders*, memerlukan komitmen terhadap perbaikan seluruh aspek manajemen organisasi. Hal ini sesuai dengan konsep Edward Deming yang dikenal dengan konsep *Kaizen* secara luas diperkenalkan oleh Masaaki Imai dalam bukunya *Kaizen: "the key to Japan's competitive success"* (1986), menyimpulkan:

“Kaizen mengatakan bahwa hanya dengan secara terus menerus, tetap sadar dan membuat beratus-ratus ribu peningkatan kecil, maka dimungkinkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang mutunya otentik sehingga memuaskan pelanggan. Untuk mencapainya dengan ikut aktif, ada motivasi dan peningkatan kecil yang terus menerus dari semua anggota dalam organisasi. Keikutsertaan aktif berkomitmen, strategi yang jelas dan kesabaran merupakan proses yang berjalan secara terus menerus untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan” (Cane, 1998:265) (Ismail, 2016).

Di Indonesia dalam rangka peningkatan mutu pendidikan salah satu upaya adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang pada pasal 1 ayat 17 menjelaskan bahwa, standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Presiden RI, 2003), sedang mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut (Kemendiknas, 2018).

Peningkatan mutu merupakan salah satu masalah yang erat kaitannya dengan kebijakan, komitmen, dan prioritas dari pengembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Menurut Edward (dalam Fitriah, 2018), mutu adalah standar yang menunjukkan kualitas keunggulan dari sesuatu pendidikan tinggi (Fitriah, 2017), oleh karena itu penyelenggara pendidikan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan aktivitas penjaminan mutu secara otonom yang dikenal dengan penjaminan mutu internal. Untuk meningkatkan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas (Wicaksono, 2016).

Penjaminan mutu internal pada pendidikan tinggi telah menerima banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam akademik maupun praktik. Asosiasi profesional telah mulai menangani masalah ini dengan serius, salah

satunya asosiasi Eropa untuk jaminan mutu dalam pendidikan tinggi yang telah membentuk kelompok kerja multi-tahun untuk mengeksplorasi bagaimana mengukur dampak dan jaringan agen jaminan mutu internasional dalam pendidikan tinggi (Beerrens, 2018), di Norwegia dengan menggunakan data dari survei yang *representatif* di antara staf akademik Norwegia, menyatakan bahwa prosedur jaminan mutu internal saat ini berfungsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan menunjukkan kemungkinan implikasi untuk peningkatan dan pengendalian mutu di perguruan tinggi tersebut (Per Olaf Aamodt, 2018), sedangkan di pendidikan keperawatan dan kebidanan menyatakan bahwa jaminan mutu internal, efektif dalam meningkatkan mutu pengajaran dan penilaian, terutama dalam memantau dan evaluasi yang harus dilakukan rutin pada kurikulum, kompetensi dosen, dan sarana prasarana khususnya laboratorium (Essel, 2018).

Penjaminan mutu yang efektif merupakan tujuan dari semua penyelenggaraan pendidikan berkualitas. Indonesia mengenal dua sistem dalam proses penjaminan mutunya, yaitu sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME). SPMI berfungsi dalam meningkatkan mutu, mewujudkan visi, dan misi, dan sebagai sarana untuk mendapatkan akreditasi pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sementara itu, SPME dirancang untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan telah menerapkan proses penjaminan mutu internal yang efektif (Beerrens, 2018).

SPMI dipandang sebagai salah satu cara untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pendidikan tinggi di Indonesia, dimana perguruan tinggi dikatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya

melalui pelaksanaan misinya, serta mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan *stakeholder* yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan *profesional*. Sehingga, perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal oleh perguruan tinggi yang bersangkutan (Apri, 2018).

Program studi kebidanan adalah salah satu pendidikan vokasi, menurut pasal 16 ayat (1) UU Dikti, pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. yang diperuntukkan bagilulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Kurikulum pendidikan vokasi disiapkan bersama dengan masyarakat, profesi, dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesinya agar memenuhi syarat kompetensi profesinya (Kemenristekdikti, 2018), berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan menyatakan bahwa mahasiswa kebidanan pada akhir masa pendidikan harus mengikuti uji kompetensi yang bersifat nasional dan merupakan syarat kelulusan (Presiden RI, 2019).

Uji kompetensi bidan di Indonesia baru mulai dilaksanakan sejak tahun 2013 dan hasil rata-rata 30% peserta tidak lulus uji kompetensi bidan dengan nilai batas lulus 40,14 %. Daftar peserta uji kompetensi bidan dari periode 2018 sampai periode 2019 tingkat kelulusan rata-rata periode masih rendah yaitu 39 % tingkat kelulusan (Fitria, 2019). Kompetensi lulusan yang rendah pada program studi kebidanan dilihat dari hasil uji kompetensi secara nasional, salah satunya dapat

disebabkan oleh pengelolaan di program studi masih dipandang kurang, terutama pada standar pengelolaan pembelajaran. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya kurikulum yang diterapkan belum sesuai KKNI, kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana sebagai pendukung proses pembelajaran terutama kelengkapan laboratoriumnya (Sumarmi, 2019), sehingga pengelolaan pembelajaran di program studi kebidanan sangat penting untuk untuk dikendalikan dan ditingkatkan dengan melaksanakan SPMI pada standar pengelolaan pembelajaran.

Namun berdasarkan *grandtour* yang dilakukan oleh peneliti dari 7 (tujuh) program studi kebidanan, 5 (lima) diantaranya mengatakan lebih mementingkan SPME atau akreditasi, daripada mementingkan SPMI, karena pada saat pelaksanaan SPMI di program studi kebidanan banyak mendapatkan kendala seperti sumber daya manusia (SDM) yang kurang kompeten, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan dana yang tidak mendukung. Pelaksanaan akreditasi selalu menjadi tujuan peningkatan mutu yang instan, begitu nilai akreditasi keluar, program studi biasanya tidak lagi melakukan evaluasi mutu secara internal, pengendalian dan peningkatan mutu tidak terkontrol, sehingga berimbas pada kompetensi lulusan, proses belajar mengajar, seperti kurikulum yang kurang *update*, dosen yang bervariasi dalam memberikan metode pembelajaran, dan sarana prasarana khususnya di laboratorium kebidanan yang sudah banyak tidak layak pakai, menyebabkan kompetensi lulusan yang dihasilkan kurang memenuhi *ekspetasi* dari *stakeholder* (Apri, 2018).

Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan SPMI standar pengelolaan pembelajaran di program studi kebidanan yang menurut peneliti perlu



mendapatkan prioritas, dikarenakan dewasa ini keunggulan suatu bangsa bukan lagi diidentikkan dengan melimpahnya ruang kekayaan alam yang ada, akan tetapi lebih kepada keunggulan sumber daya manusianya, karena mutu sumber daya manusia berkontribusi positif bagi mutu pendidikan (Fitrah, 2017). Sehingga masalah penjaminan mutu secara internal dalam pengendalian dan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran dianggap sebagai alat strategis utama yang berdampak pada kualitas lulusan (Rahnuma, 2020).

Pengelolaan pembelajaran di suatu program studi terutama pada pendidikan kebidanan adalah kunci pendorong bagi perkembangan dan kemajuan, serta tanggung jawab untuk meningkatkan *akuntabilitas* keberhasilan mahasiswa dan programnya. Untuk tercapai dengan baik, maka pengelola perlu diberdayakan, sehingga mampu berperan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya (Karina Purwanti, 2014).

## **B. Fokus dan Sub Fokus**

Berkaitan dengan pentingnya pengendalian dan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran di program studi kebidanan maka fokus penelitian ini adalah pelaksanaan SPMI standar pengelolaan pembelajaran di program studi kebidanan dengan sub fokus sebagai berikut:

1. Penetapan standar pengelolaan pembelajaran dalam SPMI di program studi kebidanan dilihat dari kelengkapan minimal dokumen standar sejumlah 24 standar, khususnya standar pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga pendidikan, serta standar sarana

prasarana

2. Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dalam SPMI di program studi kebidanan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan program studi.
3. Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dalam SPMI di program studi kebidanan dilihat dari perencanaan evaluasi meliputi apa yang dievaluasi, siapa yang mengevaluasi, dan bagaimana cara melakukan evaluasi
4. Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dalam SPMI di program studi kebidanan dilihat dari hasil evaluasi apakah pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran melampaui, sesuai, tidak melampaui atau menyimpang dari standar
5. Peningkatan standar pengelolaan pembelajaran dalam SPMI di program studi kebidanan dengan melihat apakah ada standar yang baru, standar yang diperbaiki, atau standar yang mencirikan kekhasan program studi.
6. Perbedaan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dalam SPMI di program studi kebidanan dilihat dari hasil pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dalam SPMI .

### **C. Masalah Penelitian**

SPMI dipandang sebagai salah satu solusi untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pendidikan tinggi di Indonesia. Namun pelaksanaan SPMI di pendidikan tinggi terutama pendidikan kebidanan bukan tanpa masalah, berbagai masalah muncul, diantaranya adalah kesadaran, komitmen dan

pemahaman terhadap konsep dan implementasi SPMI pada pengelola pendidikan masih rendah, tata kelola dan mekanisme kerja belum terbangun dengan utuh, dan pemberdayaan sumber daya manusia khususnya dosen dan tenaga kependidikan belum dilakukan secara optimal, sehingga penyelenggara pendidikan kebidanan lebih mementingkan akreditasi dari pada mementingkan SPMI, karena akreditasi selalu menjadi tujuan peningkatan mutu yang instan.

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Setelah ditemukan masalah penelitian yang telah diuraikan diatas, maka ditetapkan pertanyaan penelitian Bagaimana pelaksanaan SPMI standar pengelolaan pembelajaran dilihat dari :

1. Bagaimana penetapan standar pengelolaan pembelajaran dalam SPMI di program studi kebidanan?
2. Bagaimana pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dalam SPMI di program studi kebidanan ?
3. Bagaimana evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dalam SPMI di program studi kebidanan
4. Bagaimana pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dalam SPMI di program studi kebidanan
5. Bagaimana peningkatan standar pengelolaan pembelajaran dalam SPMI di program studi kebidanan
6. Bagaimana perbedaan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dalam SPMI di program studi kebidanan



### E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pelaksanaan SPMI standar pengelolaan pembelajaran melalui evaluasi :

1. Penetapan standar pengelolaan pembelajaran dalam SPMI di program studi kebidanan
2. Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dalam SPMI di program studi kebidanan
3. Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dalam SPMI di program studi kebidanan
4. Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dalam SPMI di program studi kebidanan
5. Peningkatan standar pengelolaan pembelajaran dalam SPMI di program studi kebidanan
6. Pembuktian adanya perbedaan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dalam SPMI di program studi kebidanan

### F. *State of the Art* Penelitian

Penelitian sebelumnya berfungsi untuk analisis dan memperkaya pembahasan penelitian, serta membedakannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam penelitian ini disertakan 5 (lima) jurnal internasional penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penjaminan mutu, jurnal tersebut antara lain ;

1. Penelitian dengan judul *The Bangladeshi higher education quality*

*assurance framework: a pathway for transformation*, diambil dari jurnal *Quality in Higher Education* diteliti oleh Naureen Rahnema pada tahun 2020 di Banglades yang menyatakan tentang rancangan kerangka penjaminan mutu di perguruan tinggi Bangladesh telah terwujud dalam waktu kurang dari satu dekade. Pendidikan tinggi harus menjalani penjaminan mutu internal selain penjaminan mutu eksternal dalam peningkatan mutu, dengan penjaminan mutu internal yang kuat sangat diperlukan untuk mempercepat proses akreditasi (Rahnema, 2020).

2. Penelitian dengan judul *Assessing quality assurance in higher education quality managers' perceptions of effectiveness*. Diambil dari *European Journal of Higher Education*, diteliti oleh Seyfried, Markus, Pohlenz, Philipp pada tahun 2018 di Jerman menyatakan bahwa tanpa dukungan dari manajemen yang lebih tinggi atau kepemimpinan, penjaminan mutu dalam proses belajar mengajar adalah 'macan ompong'. sehingga peluang bersaing dengan perguruan tinggi lain akan terbatas. Dukungan dan kerjasama dengan seluruh sivitas akademika dapat meningkatkan *efektifitas* penjaminan mutu pengelolaan pembelajaran (Seyfried, 2018).
3. Penelitian dengan judul *Evaluation of Effectiveness of Internal Quality Assurance System in Public Universities in Ghana*. Diambil dari jurnal *Education Quarterly Reviews*, diteliti oleh Eshun, Peter Dampson, Dandy George Dzakadzie, Yayra pada tahun 2020 di Ghana menyatakan tentang budaya mutu di perguruan tinggi, penjaminan mutu yang dilakukan perguruan tinggi tidak akan berhasil bila hanya melengkapi bukti dokumen namun tidak ada komitmen dalam menjalankan penjaminan mutu, karena hasil

nyata dari pencapaian budaya mutu di perguruan tinggi akan terwujud apabila seluruh civitas akademika menjalankan penjaminan mutu dengan sistem penjaminan mutu internal (Eshun, 2020)

4. Penelitian dengan judul *Internal quality assurance practices of nursing and midwifery training colleges and the role of regulatory bodies: The perspectives of health tutors* diambil dari *Journal of Nursing Education and Practice* diteliti oleh Barton, Harry Boakye-Yiadom, Messelichael Mohammed, Shamsudeen di Ghana tahun 2018 menyatakan pentingnya jaminan mutu internal di pendidikan perawatan dan kebidanan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat (Essel, 2018).
5. Penelitian dengan judul *Exploring internal quality assurance for nursing education in the State University of Zanzibar, Tanzania: A preliminary needs analysis* diambil dari *African Journal of Health Professions Education* diteliti oleh Bilal, M Manning, D di Tanzania tahun 2020 menyatakan proses penjaminan mutu internal diakui penting untuk memastikan hasil pendidikan tinggi dan kompetensi lulusan yang baik di pendidikan keperawatan, namun dalam pelaksanaannya, kesadaran pendidik masih rendah dilihat dari pemahaman mereka tentang konsep, prosedur dan proses pelaksanaan penjaminan mutu internal (Bilal, 2020)

Tabel 1.1 *State of the Art Penelitian*

Tahun	Nama penulis dan Jurnal	Judul dan Metode
2020	Naureen Rahnuma <i>Quality in Higher Education</i> volume 26, issue 1 2020	<i>The Bangladeshi higher education quality assurance framework: a pathway for transformation</i> Studi literature
2018	Seyfried, Markus Pohlenz, Philipp <i>European Journal of Higher Education</i> Volume 8, 2018	<i>Assessing quality assurance in higher education quality managers' perceptions of effectiveness</i> mixed-methods ( <i>sequential explanatory design</i> )
2020	Peter Eshun, Dandy George Dampson, Yayra Dzakadzie <i>The Asian Institute of Research Education Quarterly Reviews</i> Vol.3, No.2, 2020	<i>Evaluation of Effectiveness of Internal Quality Assurance System in Public Universities in Ghana</i> mixed methods (CIPP)
2018	Barton, Harry Boakye-Yiadom, MEsselichael Mohammed, Shamsudeen <i>Journal of Nursing Education and Practice</i> volume 8 issue 10 2018	<i>Internal quality assurance practices of nursing and midwifery training colleges and the role of regulatory bodies: The perspectives of health tutors</i> Analysis of Variance (1-way ANOVA)
2020	Bilal, M Manning, D <i>African Journal of Health Professions Education</i> volume 12 issue 4 2020	<i>Exploring internal quality assurance for nursing education in the State University of Zanzibar, Tanzania: A preliminary needs analysis</i> Kuantitatif

dari beberapa studi pendahuluan tersebut peneliti belum menemukan kajian secara mendalam tentang pelaksanaan SPMI standar pengelolaan pembelajaran di program studi kebidanan dan inilah yang menjadi *novelty* atau kebaruan dari penelitian ini.

### G. Roodmap Penelitian

